

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN
PERJUDIAN DITINJAU MENURUT FIKIH SIYASAH**
(Studi di wilayah Desa Natar Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RICKY IRAWAN
NPM (1521020162)

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN
PERJUDIAN DITINJAU MENURUT FIKIH SIYASAH**
(Studi di wilayah Desa Natar Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

RICKY IRAWAN
NPM (1521020162)

Jurusan : Siyasa Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019

ABSTRAK

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju terhapusnya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah aturan yang secara khusus mengatur tentang larangan perjudian di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Namun dilapangan masih dijumpai praktek perjudian. Salah satunya adalah wilayah yang akan dijadikan objek penelitian tepatnya di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, masih ditemui praktek-praktek perjudian dalam keseharian masyarakat berupa judi domino, kartu joker, kupon putih/togel, dan sabung ayam.

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan? Serta bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perjudian tersebut? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, serta untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperlukan didalam penelitian ini penulis peroleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepolisian Sektor Natar, dan Pemerintah Desa Natar, dengan cara melalui wawancara dan observasi. Setelah kesemua datanya terkumpul lengkap penulis menganalisa dengan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedah mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada setelah itu diadakan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif*.

Hasil penelitan ini dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan dengan upaya preventif maupun represif. Namun belum maksimal dalam hal pengawasan, sehingga perjudian belum hilang sepenuhnya. Adapun tinjauan Fikih Siyasah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang larangan perjudian dapat dibenarkan dalam islam sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar melanggar nilai-nilai islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : RICKY IRAWAN

NPM : 1521020162

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian di Tinjau Menurut Fikih Siyasah (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag
NIP. 195902151986031004

Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Dr. Nurnazli, S.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian di Tinjau Menurut Fikih Siyasah (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh **RICKY IRAWAN (1521020162)** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 2 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)



Dr. H. Muhammadruddin, M.H.I.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (الإمران : ١٠٤)

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali-Imran:104).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisther, 2007), h. 93.

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karna itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Ayahku (M.Hartono) dan Ibuku tercinta (Sunanti), yang terus menyayangiku dan selalu mencurahkan kasih sayangnya serta mendoakan demi keberhasilanku.
2. Kakakku (Asep Kholis Nur Jamil, Endang Hartatik, dan Hendri Irawan) Serta Adikku (Dewi Sartika) yang selalu memberikan motivasi.
3. Sahabat Satria Bahari angkatan 13 yang selalu ada dan menghibur baik susah maupun senang, teman-teman siyasah angkatan 2015 yang memberikan warna dalam menempuh pendidikan.
4. Guru dan dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ricky Irawan, lahir pada tanggal 07 Januari 1995 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Anak ke-tiga dari empat bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak M. Hartono dan Ibu Sunanti.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri Sinar Jati Tegineneng lulus pada tahun 2006. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung lulus tahun 2009. SMK Satria Bahari Bandar Lampung lulus pada tahun Tahun 2012. Dan melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 07 Juli 2019
Penulis,

Ricky Irawan
NPM.152020162

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tiada Tuhan selain Dia, yang berkuasa seluruh alam semesta.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, sehingga skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PERJUDIAN DITINJAU MENURUT FIKIH SIYASAH (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”**, dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Para keluarga, sahabatnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis samapaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Drs. Susiadi., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyash yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag dan Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I. masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu, yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 07 Juli 2019
Penulis,

Ricky Irawan
NPM.1521020162

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fikih Siyasah	
1. Pengertian Fikih Siyasah	14
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah	18
3. Konsep Lembaga Negara Dalam Islam.....	20
4. Kedudukan Fikih Siyasah dalam sistematika Hukum Islam	25
B. Imarah	
5. Pengertian Imarah.....	30
6. Tugas dan Wewenang Imarah	33
C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Perjudian.....	36
2. Unsur-unsur Perjudian	38
3. Dasar Hukum Larangan Perjudian	38
4. Sanksi Perjudian	42

BAB III LAPORAN HASIL PENEITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Desa Natar	51
2. Batas Wilayah.....	53
3. Luas Wilayah.....	53
4. Orbitrasi Desa Natar	53
5. Keadaan Penduduk	54
6. Struktrur Organisasi Pemerintahan.....	55
B. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	57

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian	59
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.....	68
B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian Ditinjau Menurut Fikih Siyasah (Studi di Wilayah Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian

“Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/WaliKota). Mengatur dengan tegas larangan perbuatan perjudian, dimana tercantum pemberian sanksi bagi pelaku perjudian didenda paling banyak Rp 5 juta atau ancaman kurungan selama 6 bulan.”²

² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian

2. Perjudian

“Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.”³

3. Fikih Siyasah

“Fikih Siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.”⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menurut fikih siyasah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, pasal 1 huruf j.

⁴ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17.

Bupati/WaliKota) yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia khususnya di Desa Natar Kecamatan Natar sebagai salah satu bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang larangan perjudian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Pelaksanaan sebuah peraturan sangat diperukan sebagai bukti bahwa aparat pemerintah telah melaksanakan tugas dan wewenang guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan ini diangkat karena belum ada yang membahas pembahsan ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selain itu permasalahan ini sangat relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).
- b. Ketersedian data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan di teliti, baik data primer dan sekunder serta akses letak objek penelitian mudah di jangkau untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Fikih Siyasah sebagai salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang tercantum dalam politik pelaksanaan perundang-undangan, bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah mengatur dan mengurus persoalan-persoalan duniawi dengan merumuskan suatu prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Perundang-undangan yang diciptakan adalah untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur manusia itu sendiri.⁵

Dalam prespektif hukum Islam, perjudian adalah haram sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya adalah haram. Hal ini tertuang dalam al-qur'an surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S al-Maidaah 90).⁶

Dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta’ala menggandengkan judi (*maisir*) dengan *khamr*, *al-anshab* dan *al-azlam*. Ini adalah perkara-perkara yang tidak

⁵ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 4

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007), h. 97.

diragukan lagi keharamannya.⁷ Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi adalah perbuatan yang harus dihindari umat islam.

Dalam prespektif hukum positif guna mencegah dan memberantas perjudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menerangkan, pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda bangsa.⁸ Dan dalam KUHP pasal 303, menyebutkan bahwa perjudian adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.⁹

Kemudian dalam perjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan wujud nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan naskah Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan perbuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan maksiat di wilayah Kabupaten Lampung. Tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan:

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghofar, jilid 1 (Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 423.

⁸ Undang-Undang, Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian,

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

1. Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja membiarkan tempat usahanya atau menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau tempat perjudian.
2. Setiap orang atau badan dilarang melibatkan diri dalam suatu perjudian baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.
3. Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap perjudian.
4. Setiap orang atau badan dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.
5. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai pemain atau kesenangan dengan alasan apapun.¹⁰

Pada dasarnya perjudian ini menyangkut masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang tak bermoral. Mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Apalagi belakangan ini, di zaman yang serba kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa di antaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa pertimbangan akibat hukumnya.¹¹

Sekalipun dalam aturannya telah tegas menyatakan bahwa perjudian adalah haram dalam hukum Islam dan dilarang dalam hukum positif yang berlaku. Namun, sering kali kita jumpai ketidaksesuaian dengan fakta yang

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung, Pasal 4.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), h. 40.

ada. Salah satunya wilayah yang akan di jadikan objek penelitian oleh penulis, tepatnya di desa Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Masyarakat dengan sengaja melibatkan dirinya sebagai pemain maupun terlibat membantu terjadinya perjudian.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Lampung Selatan yaitu sebuah penggerebekan yang dilakukan Tim Reserse Kriminal Polsek Natar Lampung Selatan. Menggerebek sebuah rumah di Dusun Sindang Sari, Desa Natar, Kecamatan Natar karena rumah tersebut di jadikan tempat perjudian. oleh petugas kemudian diamankan lima tersangka, dan kelima tersangka tersebut ialah pemuda. Bahkan salah diantaranya ada yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas. Dari lima tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dua set kartu domino, satu buah tas sebagai pembungkus dadu koprok, dan selembur tikar.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dalam suatu kajian yang bersifat ilmiah dengan judul: “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian Ditinjau Menurut Fikih Siyasah (Studi di Wilayah Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”

¹² Lampung Tribun News, <http://lampung.tribunnews.com/>, diakses pada kamis 12 juni 2018 pukul 21.00 WIB

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik dari sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam dilingkungan akademisi

perguruan tinggi dan sumbangan khasanah pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H)

F. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹³ Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui tingkat

¹³Sugiono, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 34

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.¹⁴

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yaitu keseluruhan dari objek penelitian atau objek lengkap sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur-unsur Aparatur Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, pihak Penegak Hukum Peraturan Daerah yaitu Kepolisian Sektor Natar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapat pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang disebut dengan sampel. Dalam hal ini penelitian tidak menggunakan populasi melainkan menggunakan sampel.

¹⁴ *Ibid.* h. 55

¹⁵ Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 109

b. Sampel

Yaitu sekumpulan atau sebagian dari populasi yang diperoleh melalui proses sampling tertentu. Sedangkan dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁶ sampel dalam penelitian ini terdiri dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan (1 Orang), Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Natar (1 Orang), Sekretaris Desa Natar (1 Orang), Babinkamtibmas Desa Natar (1 Orang).

3. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Bupati dalam Penegakan Peraturan Daerah, Kepolisian Sektor Natar, Pemerintah Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang

¹⁶*Ibid.* h. 155

penulis teliti seperti, Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat permasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian yang berada di Desa Natar Kabupaten Lampung.¹⁷

b. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.¹⁸ Metode ini secara langsung diajukan kepada responden mengenai masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian yang berada di Desa Natar Kabupaten Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau

¹⁷*Ibid* h. 90.

¹⁸ Surmisi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2014), h. 102.

sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.¹⁹ yaitu dokumen yang berkaitan dengan data mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian yang berada di Desa Natar, Kabupaten Lampung.

5. Analisis Data

Analisa data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif* yakni dengan cara mengumpulkan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga dapat dijadikan satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Analisa ini dilakukan dengan cara berfikir *deduktif* dengan terjun langsung kelapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus²⁰, mengenai pelaksanaan larangan perjudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Desa Natar Kabupaten lampung Selatan.

¹⁹ *Ibid.* h. 101.

²⁰ *Ibid.* h. 133.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan tashrifan dari kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²¹

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata (سياس - سياسة) yang artinya mengatur, mengendalikan, merumuskan atau membuat keputusan. Kata ini dalam kamus besar Al-Munjid dan Lisan al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab*, siyasah (*siyasah*) adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemashlahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan,

²¹ Ibnu Syarif, Muja dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h.31.

yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.”²²

Definisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim yang dinukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan: “Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya.” Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara.”²³

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan fikih siyasah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur’an maupun al-Sunnah.²⁴

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun

²² J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta:PT Raia Geafinda Persada, 1997), h.22-23

²³ *Ibid.*, h. 24

²⁴ Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1993), 10.

hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Menurut Abul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

Menurut Hasbi Ashshiddiqie, objek kajian fikih siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.²⁶

Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek bahasan Fikih Siyasah secara garis besar adalah:

- a. peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat,
- b. pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan,

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 26.

²⁶ *Ibid.*, h. 29

c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.²⁷

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* (Fikih) dan *siyasah* (Siyasah). Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fikih dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih siyasah ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.”²⁸

Sedangkan hubungan antara ilmu *fiqh* dan Fikih siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, Fikih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fikih atau dalam kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan fikih siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²⁹

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas, dalam politik Islam (Siyasah) terdapat tiga unsur yang berkaitan satu sama lain yaitu:

²⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Bairut, 1966, h. 4

²⁸ ²⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 60

²⁹ *Ibid*, h. 65.

- a. Bahwa fikih siyasah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin)
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.³⁰

Berdasarkan hakikat fikih siyasah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok fikih siyasah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fikih Siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang.

Adapun Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan Fikih Siyasah-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, h. 11

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Administrasi Negara (*siyasah idariyyah*)
- c. Ekonomi dan Moneter (*siyasah maliyyah*)
- d. Hubungan Internasional (*siyasah daiuliyyah*)
- e. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah*).³¹

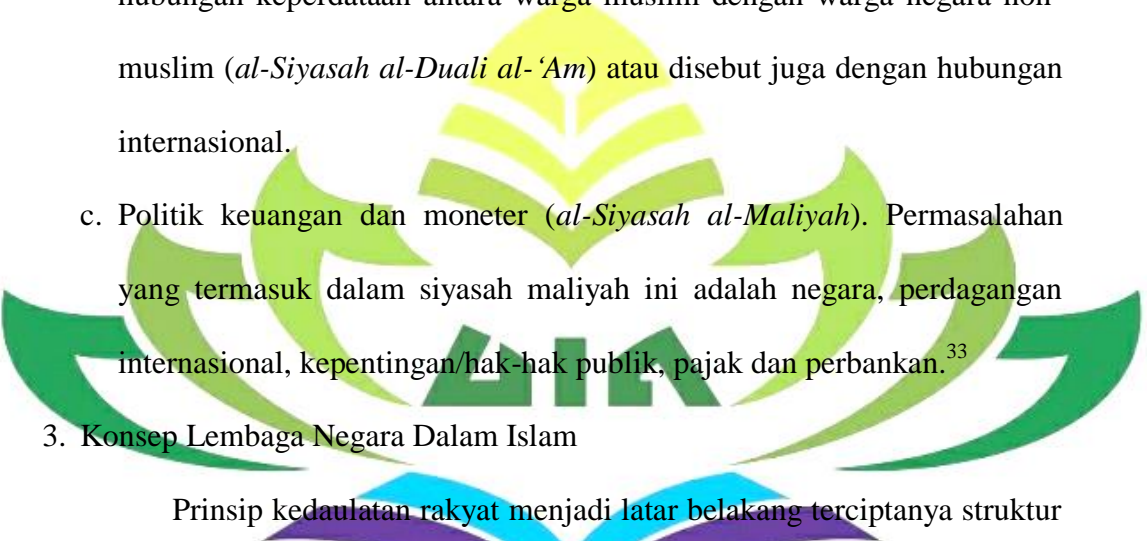
Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyâsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijakan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³²

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fikih siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

³¹ Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 14

³² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 30.

- 
- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
 - b. politik luar negeri (*al-Siyasah n al-Dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³³

3. Konsep Lembaga Negara Dalam Islam

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang

³³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 36

telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.³⁴

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-tanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif).³⁵

a. *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif)

Dalam kajian fikih siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.³⁶

³⁴ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan, 1996), h. 57

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada2001), h. 62

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada2001), h. 64

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.³⁷

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam .
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.³⁸

b. *Sulthah al-thanfidiyyah* (Kekuasaan Eksekutif)

³⁷ *Ibid*, h. 65

³⁸ *Ibid*, h. 65

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah'das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.³⁹

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

³⁹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II, h. 247

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁰

c. *Sulthah al-qadha' iyyah* (Kekuasaan Yudikatif)

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fikih Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.⁴¹

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukumhukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), h. 62

⁴¹ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), h. 65

tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.⁴²

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁴³

4. Kedudukan Fikih Siyasah dalam sistematika Hukum Islam

Sebelum pembahasan kedudukan fikih siyasah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan Fikih Siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.

⁴² *Ibid*, h. 66

⁴³ Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273

Pertama, Hubungan manusia dengan Tuhannya; Kedua, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; Ketiga, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁴⁴

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.⁴⁵

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fiqh yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari Fiqh 'Ibâdah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 33.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 34

antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Quran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.⁴⁶

- b. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.⁴⁷

Dari pembagian ini, maka Dr. Wahbah al-Zuhaylî pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan *fiqh mu'amalat* ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:

- a. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
- b. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
- c. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
- d. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan suatu kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 36.

⁴⁷ *Ibid*, h. 37.

- e. Hukum dusturiyyah: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, fiqh membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.
- f. Hukum dauliyah: hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, international affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
7. Hukum perekonomian dan keuangan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.
- g. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam fikih yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan fiqh adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.⁴⁸

Secara kedudukan, fikih siyasah berada di dalam *fiqh mu'amalat*. Ini apabila fikih muamalah diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fikih muamalah diartikan secara sempit maka fikih siyasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), h. 35-36.

diartikan secara sempit, menurut Khudlari Beik, “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat”.⁴⁹

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siyasah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan fikih siyasah di dalam *fiqh mu'amalat* secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fikih siyasah-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fikih siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.⁵⁰

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fikih siyasah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep *fiqh munakahah* tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.⁵¹

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 15.

⁵⁰ Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 11

⁵¹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fikih siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fikih siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁵²

B. Imarah

1. Pengertian *Imarah*

Imarah berasal dari kata *amara*, *Imaratun* yang berarti “perintah atau pemerintah”.⁵³ Menurut ‘Abdul Qadir definisi dari *imarah*, berasal dari kata *amir* yaitu “orang yang memiliki wewenang (kekuasaan)”. Sedangkan menurut Al-Dumaji dalam bukunya *al-Imamah al-‘Uzma*, “*Imarah*, *Imamah*, dan *Khalifah* adalah sinonim”. *Imarah* adalah bagian atau salah satu dari jenis pemerintahan, yakni *Wilayah al-Amri*.⁵⁴

Menurut istilah *Imarah* berarti “*keamiran*” atau “Pemerintahan” pengertian ini tidak jauh beda dengan *imamah*, hanya saja penggunaanya

⁵² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 12

⁵³ *Ibid*, h. 83.

⁵⁴ Pulungan Sayuti, *Op. Cit*, h. 27

ditinjau dari segi penggunaa. Imarah adalah sebutan untuk jabatan amir dalam sebuah negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.⁵⁵

Umar Bakri Muhammad membagi *imarah* dalam Islam menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Imarah khassah* (Imarah Khusus) yakni Kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang *amir* (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula.
- b. *Imarah Ammah* (Imarah Umum) yakni Kekuasaan umum atas semua orang muslim dalam umat yaitu seorang *amir* (pemimpin) untuk menegakkan dan melindungi agama Islam serta menyebarkannya, dan tugas-tugas lainnya.⁵⁶

Imarah khassah (Imarah Khusus) biasanya dikaitkan dengan kekhususan jenis kewajiban tertentu, seperti kewajiban adanya seorang *amir safar* dalam sebuah perjalanan, yang mana dengan adanya amir tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya berkaitan dengan perjalanan tersebut. Contoh lain dari hal ini sebagaimana seorang *amir dakwah* untuk dakwah mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya yang berkaitan dengan masalah dakwah, dan *amir jihad* untuk jihad yang mempunyai kekhususan spesifik atas para pengikutnya dalam masalah jihad.⁵⁷

⁵⁵ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta:PT Raia Geafinda Persada, 1997), h.27

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Loc. Cit*, h. 92

⁵⁷ *Ibid.*, h. 92

Imarah khassah (Imarah Khusus) adalah jika sekelompok kaum muslimin berkumpul dan bersepakat untuk mengangkat seorang muslim untuk memerintah dan menghukumi diantara mereka dengan Islam, karena mereka tidak berada di Dar al-Islam (karena Dar al-Islam belum tegak). Kekuasaan seorang amir bersifat khusus yakni berlaku hanya bagi para pengikutnya di wilayah tersebut, dan tidak berlaku bagi bagian umat lainnya, kecuali kepemimpinan mereka berkembang dan akhirnya mereka mampu untuk menegakan kepemimpinan yang dengan demikian secara otomatis mereka akan menjadi *imarah* umum dan seluruh kaum muslimin menjadi wajib untuk taat dan memberikan bai'atnya.⁵⁸

Imarah Ammah (Imarah Umum) lebih dikenal dengan istilah Khalifah, Imamah atau Amir al-Mu'minin. Menurut al-Dumaji, khalifah adalah Imamah al-Qubra. Imamah al-Qubra adalah Dar al-Islam (Negara Islam) di bawah kepemimpinan seorang khalifah.⁵⁹

Imarah khusus dikenal sebagai *al-Jama'ah al-Islamiyah* (kelompok Islam), individu-individu bekerja secara kolektif di bawah kepemimpinan seorang *amir* (pemimpin), atau masyarakat Islam yang kecil. Amir (pemimpin) dari kelompok ini tidak bisa menerapkan hudud, karena hal itu hanya fungsi khalifah atau amir (pemimpin) dari Jama'ah al-Muslimin. Nabi saw, bersabda: "Setiap orang dari kamu adalah pemimpin (pengembala) dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (gembalaannya)". Tipe kepemimpinan seperti ini disebut dengan *imarah*

⁵⁸ *Ibid*, h. 46

⁵⁹ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta:PT Raia Geafinda Persada, 1997), h.91

khusus dimana mandat atau kekuasaannya spesifik atau khusus yakni atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya saja.⁶⁰

Muhammad 'Umar Bakri menjelaskan antara Jama'ah al-Qubra dengan Jama'ah al-Sughra, sebagai berikut: Jama'ah al-Qubra adalah jama'ah besar, Jama'ah al-Sughra adalah jama'ah kecil yakni grup, kelompok, atau kumpulan orang. Ketika kaum muslimin tidak memiliki seorang khalifah, maka mereka disebut dengan sebutan umat, akan tetapi ketika mereka memiliki seorang khalifah maka mereka (kaum muslimin) disebut sebagai "Jama'ah al-Muslimin".⁶¹

2. Tugas Dan Wewenang *Imarah*

Mengenai tugas/kewajiban seorang *Imarah* (seorang kepala daerah) untuk bangsa sekarang terhadap daerah dan rakyat yang dipimpinnya yang dalam hal ini penulis mengibaratkan dengan yang dikemukakan oleh Ulumuna Jurnal Studi Keislaman yang ditulis oleh Fawaizul Umam, beliau menyebutkan bahwa tugas/kewajiban utama seorang *Imarah*/Kepala Daerah, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, seperti pencurian, perampasan, perzinaan, perjudian, pemerkosaan dan lain-lain.
- b. Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (العمران: ١٠٤)

⁶⁰ *Ibid*, h. 97

⁶¹ *Ibid*, h. 99

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali-Imraan : 104)⁶²

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ (العمران: ١١٠)

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Ali-Imraan : 110)⁶³

- c. Memperkuat pertahanan negeri dengan melengkapi senjata, amunisi, dan pagar batas teritorial yang kuat.
- d. Mengawasi dinamika pasar supaya tidak terjadi instabilitas ekonomi, dan menindak tegas para pengacau pasar.
- e. Mengangkat menteri atau pejabat Negara yang memenuhi syarat, yaitu: laki-laki. Merdeka, budiman, bijaksana, menguasai ilmi agama dan ilmu adat, berani tapi rasional, tidak rakus akan harta, kritis, taat menjalankan agama, sigap dan cekatan, tidak khianat (loyal), dan memiliki rasa malu dan takut akan jalan yang tidak sepatutnya. Untuk mendapat fiur menteri yang demikian itu sulthan harus melakukan seleksi dan pengujian semacam fit and proper test.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007), h. 93.

⁶³ *Ibid.*, h. 94

f. Menegakkan hukum syara' Allah dan adat istiadat. Kepala daerah baik itu kepala maupun wakilnya, harus menjalankan hukum syara' dan adat istiadat secara berimbang, tidak untuk dipertentangkan.⁶⁴

Hal ini relevan dengan firman Allah swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النِّسَاءُ : ٥٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Q.S An-Nissa : 59)⁶⁵

Ayat ini menerangkan bahwa kita diwajibkan untuk mentaati Allah dalam arti menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, yang kedua kita harus mentaati Rasul karena Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi ini untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan beliau juga sebagai suri tauladan di muka bumi. Kemudian yang ketiga kita disuruh mentaati *ulil amri* (pemimpin), kemudian pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati, tidak lain pemimpin yang telah ditentukan oleh Allah, dan apabila pemimpin itu

⁶⁴ Fawaizul Umam, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, (Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram, 2005), 289-290.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), h. 128.

melanggar apa yang telah disyariatkan Allah dan berbuat zalim maka itu tidak boleh taat kepadanya.

Pada masa Dinasti umayyiah gelas *amir* hanya digunakan oleh penguasa daerah provinsi yang juga disebut *wali* (hakim, penguasa, dan pemerintah). Tugasnya pun mulai dibedakan dan ia didampingi oleh beberapa pejabat yang ia angkat. Dalam melaksanakan tugasnya ia didampingi oleh pejabat pendapatan (*shahib al-kharaj*), pejabat kepolisian (*shahib al-syurtat*), dan hakim (*qadhi*).⁶⁶

Selain itu juga seorang bertugas mengawasi percetakan uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk menyampaikan baiat kepada khalifah yang baru diangkat membangun sarana-sarana umum, seperti jembatan, jalan, dan mengirim sebagian penghasilan daerah ke Damaskus. Pada masa dinasti Abbasiyah, penguasa daerah disebut amir. Umumnya tugas amir pada periode ini antara lain: mengelola pajak, mengelola administrasi urusan sipil, dan keuangan. Ia didampingi oleh seorang pejabat keuangan yang disebut amil.⁶⁷

C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (الميسر) atau *qimar*, (القمار) dalam bahasa Arab yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu

⁶⁶ Tim penyusun Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1981/1982, 77

⁶⁷ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta:PT Raia Geafinda Persada, 1997), h.64-65

yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁶⁸

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* atau perjudian itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maisir*/perjudian adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak punjika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁶⁹

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir* menurut pengarang Al-Munjid ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁷⁰

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macambentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang

⁶⁸ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu?, (Lembaga Kajian Ilmiah Institusi Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 24

⁶⁹ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Grafika Mandala, 2000) h. 297

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h. 423.

membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Unsur-unsur Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/perlombaan
- b. Ada taruhan
- c. Keberuntungan.⁷¹

3. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, kata judi atau (*maisir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 219, surat al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maisir*, *al-anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Di dalam surat al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman sebagai berikut:

⁷¹ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu?, (Lembaga Kajian Ilmiah Institusi Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 44

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿البقرة : ٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S al-Baqaraah 219).⁷²

Al-Thabariy menjelaskan bahwa dosa besar yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekuensinya ialah melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.⁷³

Di dalam surat al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المائدة : ٩٠-٩١)

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisther, 2007), h. 27.

⁷³ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, h. 358

Artinya: 90. “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 91. “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S al-Maidaah 90-91).⁷⁴

Berdasarkan ketiga ayat itu, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *maisir* haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman *maisir* dipahami dari surat al-Baqarah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Ma'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan surat al-Baqarah (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal sama.⁷⁵

Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa *maisir* sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 berikut:

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publist her, 2007), h. 97.

⁷⁵ M. Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an* (Bandung: PT. Alma'arif, 1970), h. 474.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(الأعراف : ٣٣) ﴿٣٣﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S al-Araaf 33).⁷⁶

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁷⁷

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publisther, 2007), h. 122

⁷⁷ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, h. 30-31

Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.⁷⁸

4. Sanksi Perjudian

Sanksi pidana atau hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah*, lafaz *uqubah* menurut bahasa bersal berasal dari kata عقاب⁷⁹.

Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah:



Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara."⁸⁰

Sedangkan pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

الجريمة هي الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman hukuman had atau ta'zir."⁸¹

⁷⁸ Ibid., h. 31

⁷⁹ Ahmad Ward Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 144

⁸⁰ Abdul Qadir Al-Audah, *Al-tasyri Al-Jiniy Al-Islami*, (Bairut, Dar-Alkitab, 1998), h.

⁸¹ Ibid., h. 12

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.⁸²

Khamar dan *maisir* bersanding dalam al-Qur'an yakni perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَا لَحْمَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيذَتَيْنِ خَوَازِجَيْنِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.” (hadits riwayat Muslim).⁸³

Hukuman jarimah khamar disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14.

⁸³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 93

Artinya: “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (hadits riwayat Muslim).⁸⁴

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi’i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.⁸⁵

Perjudian termasuk dalam *ta’zir*, menurut bahasa, *ta’zir* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.⁸⁶ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya.⁸⁷ *Ta’zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta’zir* ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku

⁸⁴ *Ibid.*, h. 94

⁸⁵ Rahman A I’Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 90

⁸⁶ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 14.

⁸⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 139.

manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁸⁸

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
- 2) Tindak pidana hudud yang tidak di jatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhingar dan dihapuskan.
- 3) Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diat.⁸⁹

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan

⁸⁸ 39 Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 457.

⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*, Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), Jilid III, h. 24.

masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman *ta'zir* tidak boleh menyamai hukuman *diat* atau *hudud*.⁹⁰

Adapun bentuk hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik.

Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya.

⁹⁰ H.E. Hassan Saleh Ed.1, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* ,(Jakarta: RajawaliPers, 2008), h. 465

Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.⁹¹

b. Hukuman Cambuk

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minuman khamar. Untuk jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan.⁹²

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud. Apabila orang yang dihukum ta'zir laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak

⁹¹ Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), h. 87

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 158

boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.⁹³

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
- 2) Penjara tidak terbatas, Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum

⁹³ *Ibid.*, h. 260

meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.⁹⁴

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Ahmad mawardi , *hukum pidana islam*, h. 265

⁹⁵ *Ibid.*, h. 264

e. Hukum Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan. Bagaimanapun juga, fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.⁹⁶

⁹⁶ Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, h. 101

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Natar

Berdasarkan keterangan yang didapat dari profil desa natar serta peninggalan dokumen yang ada, Desa Natar dibuka Tahun 1803 oleh tiga orang barsaudara yaitu: Ratu Pengikhan Dulu Kuning, Lanang Batin, dan Tuan Raja Lama.⁹⁷

Ketiganya berasal dari salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang sekarang Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung Panjang. Pada kira-kira tahun 1801 masuklah pemerintah jajahan Belanda ke daerah Lampung, salah satunya menginginkan menguasai Keratuan Balau, tapi semua keturunan dan ahli warisnya tidak ingin dijajah Belanda semasa itu terpaksa meninggalkan wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu mengadakan perlawanan. Maka dari keturunan tersebut di atas sebagian pindah menetap di Desa Kedamaian dan sebagian lagi di Natar. Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga saudara tersebut di atas, karena semasa akan menetap dicari di sana sini, terdapatlah tanah yang rata antara stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka dalam bahasa daerah disebut Datar atau Natar.⁹⁸

⁹⁷ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

⁹⁸ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam peresmiannya dilaksanakan kira-kira tahun 1811 yang dihadiri semua penyimbang penyimbang yang dalam adat Pepadun yaitu Pubian Telu Suku, untuk penghonnatannya. Maka Ratu Pengikhan Dulu Kuning , Lanang Batin, dan Tuan Raja Lama beserta semua ahli warisnya memotong kerbau sebanyak 41 ekor.

Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan Desa Natar adalah sebagai berikut:

- a. Buay Kuning Balau
- b. Buay Kuning Balau Khulung Gedung
- c. Buay Gunung Khulung Bujung
- d. Buay Gunung Khulung Tanoh Bih
- e. Buay Pemuka Pati.⁹⁹

Kelimanya menyimpulkan pantun Tiuh Adat yaitu: “Dalom Bangsa Kemala Lain Sai Tali Nanggai Jemaja Bintang Lima Sepakai Jakni Pesai” Pada 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan Kereta Api dalam jalur wilayahnya membelah Desa Natar, maka pada tahun itu pula bergeserlah Desa Natar ke Desa yang sekarang. Pada ketentuan Desa Natar adalah Bandar Natar dan pada kira-kira tahun 1925 berubah menjadi distrik IV Natar. Dan pada tahun 1945 berubah menjadi Asisten Widana Natar. Pada Th. 1960 berubah menjadi Kecamatan Natar. Untuk membangun Kantor Camat di bangun di desa Merak Batin karena ada tanah bekas asing

⁹⁹ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

yaitu cina. Kalau dilihat dari data diatas jelas desa natar adalah Desa yang tertua diantara Desa dalam Wilayah Kota Kecamatan Natar.¹⁰⁰

2. Batas Wilayah Desa Natar

Batas Wilayah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Merak Batin
- b. Sebelah selatan : Desa Pemanggilan
- c. Sebelah Barat : Desa Negri Sakti - Negara Ratu
- d. Sebelah Timur : Desa Merak Batin – Sidosari.¹⁰¹

3. Luas Wilayah Desa Natar

Luas Wilayah Desa Natar adalah sebagai berikut:

- a. Pemukiman 24,63 ha
- b. Pertanian Sawah tadah hujan 244,01 ha
- c. Ladang/tegalan 249 ha
- d. Sekolah 3.215 ha

Dokumen RPJMDes harus menyesuaikan dengan RPJMDes Kabupaten Lampung Selatan agar pembangunan di Kabupaten bisa berjalan serasi antara desa dan Kabupaten. Sebagai bahan usulan program desa yang akan dijalankan melalui proses musenbangdes untuk mennyusun APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.¹⁰²

4. Orbitasi Desa Natar

Orbitasi atau jarak tempuh Desa Natar adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0,5 KM

¹⁰⁰ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁰¹ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁰² Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 0,15 jam

c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 90 KM

d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 jam.¹⁰³

5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 3172 jiwa yang terdiri dari 684 Kepala Keluarga (KK).

a. Mata Pencapaian Penduduk

Untuk mengetahui mata pencapaian penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Mata Pencapaian Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Jiwa)
1	Angkatan Belum Bekerja	952
2	Petani/Penggarap Kebun/Ladang	1322
3	Pedagang	354
4	Peternak	279
5	Wiraswasta	220
6	PNS/TNI/Polri	45
	Jumlah	3172

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencapaian penduduk di Desa Natar bekerja sebagai Petani/Penggarap Kebun/Ladang dengan jumlah 1322 orang dan mata pencapaian penduduk yang paling sedikit adalah PNS/TNI/Polri 45 orang. Angkatan belum bekerja (usia sekolah dan usia lanjut usia) mencapai 952 orang.¹⁰⁴

¹⁰³ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁰⁴ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Latar belakang pendidikan penduduk Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Prasekolah	697
2	Tidak Tamat SD	368
3	SD atau sederajat	498
4	SLTP atau sederajat	875
5	SLTA atau sederajat	674
6	Diploma	38
7	Sarjana	22
Jumlah		3127

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah tamatan SMP atau sederajat dengan jumlah 875 orang, sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah Pendidikan Sarjana yaitu 22 orang.¹⁰⁵

6. Struktur Organisasi Desa Natar

a. Kepala Desa Natar : Hi. Edy Suwaspodo

b. Sekretaris Desa : M. Sulaiman, AMd.KL

Staf Sekretaris Desa :

i. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha : Yeko Bagus Cahyani, S.Kom.

¹⁰⁵ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

- ii. Kepala Urusan Perencanaan : Nurmilawati
- iii. Kepala Urusan Keuangan : Suharyati
- iv. Bendahara : Ratih Eka Pratiwi, S.Kom.

c. Unit Pelaksana Teknis

- i. Kepala Seksi Pemerintahan : Nasir Hasanuddin
- ii. Kepala Seksi Kesejahteraan : Ahmad
- iii. Kepala seksi Pelayanan : Hertati

d. Unit Pelaksana Kewilayahan

- i. Kepala Dusun I (Dusun Natar II) : Kodri
- ii. Kepala Dusun II (Dusun Sindang Sari) : M. Saleh
- iii. Kepala Dusun III (Dusun Taqwa Sari) : Hi. Syahrul Kahar
- iv. Kepala Dusun IV (Dusun Sari Rejo) : Tukimin
- v. Kepala Dusun V (Dusun Marga Taqwa) : Nuryadi
- vi. Kepala Dusun VI (Dusun Sukarame) : Sudaryono
- vii. Kepala Dusun VII (Dusun Sukamaju) : Suwarno SW
- viii. Kepala Dusun VIII (Dusun Tanjung Rejo I) : Supriyanto
- ix. Kepala Dusun IX (Dusun Tanjung Rejo II) : Sukrisno AR
- x. Kepala Dusun X (Dusun Natar I) : Zainal Arifin
- xi. Kepala Dusun XI (Dusun Sukarame Pasar) : Sugito.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Profil Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2004 merupakan peraturan tentang larangan setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja melibatkan diri, membantu, dan menyediakan tempat terhadap setiap bentuk perjudian.¹⁰⁷

Pengertian perjudian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tercantum dalam Pasal 1 huruf J yang berbunyi “Segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang atau menjajikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.”¹⁰⁸

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut seperti yang tertera dalam Ketentuan umum pasal 4, yaitu:

6. Setiap orang atau badan dilarang dengan sengaja membiarkan tempat usahanya atau menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau tempat perjudian.
7. Setiap orang atau badan dilarang melibatkan diri dalam suatu perjudian baik sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung.

¹⁰⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung, Pasal 1 huruf J.

8. Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap perjudian.
9. Setiap orang atau badan dilarang memberikan izin perjudian dengan nama, bentuk dan corak apapun.
10. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjudian, sebagai pemain atau kesenangan dengan alasan apapun.¹⁰⁹

Bagi pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian. Hal ini disebutkan dalam Bab VII Pasal 10 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam:
 - a. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
 - b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang diajukan terhadap pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung, Pasal 4 ayat 1-5.

apabila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancam untuk pelanggaran tersebut.¹¹⁰

C. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian

Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan memakai uang atau menjanjikan mengadakan taruhan baik berupa uang atau benda termasuk pembelian kupon untuk mendapatkan atau memenangkan suatu permainan.¹¹¹

Tujuan dari pelarangan perbuatan perjudian adalah memelihara dan melindungi harta benda dan kekayaan masyarakat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada perjudian, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan perjudian, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan perjudian.¹¹²

Perjudian bisa terjadi dalam bentuk permainan, contohnya tebak-tebakan, apabila di dalamnya ada unsur taruhan maka permainan tersebut termasuk perbuatan perjudian, hal ini menyulitkan petugas untuk menaggulangnya, karena petugas tidak bisa sembarangan menuduh orang melakukan pelanggaran tanpa bukti yang jelas, sedangkan permainan sendiri diperbolehkan. Namun

¹¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di wilayah Kabupaten Lampung, Bab IV Pasal 10 ayat 1-2.

¹¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, pasal 1 huruf j.

¹¹² Ahmad Fauzi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 24 Maret 2019

ada pula pelanggar yang tertangkap tangan, penangkapan ini terjadi karena adanya operasi khusus dalam beberapa kurun waktu.¹¹³

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah sesuai sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah tentang larangan perjudian di bedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tugas preventif adalah mencegah timbulnya masalah yang mengarah pada indikasi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah. Tugas ini dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengamanan, patroli wilayah, penyuluhan, bimbingan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok.
2. Tugas represif adalah penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah serta pelanggar ketenteraman dan ketertiban umum sehingga pelaku harus mematuhi ketentuan yang ada. Tugas ini dilaksanakan antara lain dalam bentuk di giatkan operasi cipta kamtibmas, operasi khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi dalam setiap kalender baru termasuk di dalamnya perjudian, prostitusi, dan premanisme yang melibatkan Tim Penertiban gabungan, terdiri dari Polisi Pamong Praja,

¹¹³ Ahmad Fauzi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 24 Maret 2019

Polisi Resort Lampung Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tim ini dibawah perintah langsung oleh bapak Bupati Lampung Selatan.¹¹⁴

Selain peran Satuan Polisi Pamong Praja pihak yang berperan penting dalam menindak pelanggaran perjudian sebagai pelaksana suatu peraturan daerah, perjudian sendiri merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Maka pihak Kepolisian adalah salah satu unsur terpenting dalam penegakan larangan perjudian yaitu sebagai pihak penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat . Menegakkan hukum yang mengacu pada aturan yang telah ada, bergerak proaktif dan terjadwal. Satpol PP dan kepolisian juga bertugas melakukan penertiban kepada pihak atau tempat-tempat yang ada pelanggaran perjudian, dan melakukan penangkapan.

Hasil wawancara dengan Febriansyah mengatakan langkah yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian, dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai ancaman pidana akibat perjudian. Sosialisasi diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda anggota karang taruna melalui anggota kepolisian yang bertugas di setiap Desa seperti Babinkamtibmas dan dari kunjungan agenda pihak kepolisian ke desa-desa demi menciptakan situasi keamanan ketertiban dalam masyarakat.¹¹⁵

¹¹⁴ Ahmad Fauzi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 24 Maret 2019

¹¹⁵ Briпка R. Febriansyah, Reserse Kriminal Polsek Natar, *Wawancara*, 12 April 2019

Kemudian tindakan yang tergolong sebagai langkah represif dalam penegakan peraturan daerah yaitu melakukan tindakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat baik perjudian, premanisme, dan prostitusi demi terwujudnya situasi cipta Kamtibmas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi lokasi yang ditengarai terdapat segala bentuk penyakit masyarakat yakni perjudian, pelacuran dan premanisme. Pada waktu identifikasi ini kalau dipandang perlu, petugas-petugas kadang melakukan penyamaran dengan mendatangi lokasi-lokasi tersebut untuk mengetahui secara jelas.
2. Apabila lokasi dan targetnya telah dapat diidentifikasi, maka kemudian dilakukan razia siang maupun malam hari.
3. Selanjutnya para pelaku yang kedapatan melakukan perjudian lalu dikumpulkan di Kantor Kepolisian Setempat untuk mengetahui identitas diri, pekerjaan dan asal-usulnya.
4. Para pelaku kemudian dibuatkan biodatanya, difoto dan apabila di dapati alat bukti maka akan dikenakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana.¹¹⁶

Razia merupakan upaya untuk memberikan ketegasan kepada para pelaku yang berhasil terjaring dan harapannya sebagai pelajaran bagi warga yang lain agar tidak terpengaruh oleh perilaku buruk para pelaku. Kemudian dalam penanggulangan perjudian masyarakat memiliki peran yang sangat penting, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pihak pemerintah khususnya

¹¹⁶ Briпка R. Febriansyah, Reserse Kriminal Polsek Natar, *Wawancara*, 12 April 2019

kepolisian bisa menjalankan penegakan hukum dengan baik, melalui masyarakat pemerintah dapat mengetahui semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat pelaksanaan suatu hukum bisa berjalan hingga saat ini.¹¹⁷

Hasil wawancara Kepada Sulaiman Sekretaris Desa Natar menerangkan pihak Desa dalam upaya menangguli penyakit masyarakat dan yang lainnya sebagai bentuk nyata dari arahan pemerintah daerah dalam memperhatikan kemaslahatan, keamanan, kenyamanan rakyatnya antara lain:

1. Membentuk POLMAS (Polisi Masyarakat) yang terdiri dari para tokoh masyarakat, dan pemuda karang taruna
2. Memberikan teguran/sanksi bagi para warga yang kedapatan melakukan perbuatan menyimpang hukum
3. Melakukan penyuluhan tentang dampak negatif dari perbuatan perjudian dan lain-lain.¹¹⁸

Di bawah arahan Babinkamtibmas tugas polmas berperan mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.¹¹⁹

Menurut Juarsyah selaku Babinkaptibmas Desa Natar khususnya mengenai praktik perjudian strategi penanggulangannya dilakukan melalui dari diri individu sendiri, keluarga, RT dan RW, sekolah, lembaga keagamaan, serta

¹¹⁷ Bripka R. Febriansyah, Reserse Kriminal Polsek Natar, *Wawancara*, 12 April 2019

¹¹⁸ Sulaiman, Sekretaris Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 26 Maret 2019

¹¹⁹ Sulaiman, Sekretaris Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 26 Maret 2019

organisasi kemasyarakatan. Tujuan utamanya tentulah untuk menghindari kemungkinan peningkatan para pelaku perjudian. harapannya kebijakan yang tepat tidak hanya mengandalkan pada pemidanaan saja, sebagaimana fungsi pokok sebagai Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat. Namun tidak bisa kita pungkiri masih ada masyarakat yang tidak mau tau tentang larangan perjudian, bahkan mereka menganggap pelaksanaan Perjudian adalah sebuah permainan yang biasa.¹²⁰

Salah satu kasus yang pernah terjadi di desa Natar kabupaten Lampung Selatan yaitu sebuah penggerebekan yang dilakukan Tim Reserse Kriminal Polsek Natar Lampung Selatan. Menggerebek sebuah rumah di Dusun Sindang Sari, Desa Natar. Karena rumah tersebut kerap di jadikan ajang perjudian. oleh petugas kemudian diamankan lima tersangka, dan kelima tersangka tersebut ialah pemuda. Bahkan salah diantaranya ada yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas. Dari lima tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dua set kartu domino, satu buah tas dan selembat tikar.¹²¹

IPTU Juarsyah selaku babinkamtibmas merangkan pengungkapan kasus tersebut adalah hasil kerjasama antara warga desa bersama aparat kepolisian, yang mana masyarakat merasa resah karena adanya perjudian di desa mereka. Dan yang tertangkap dari lima tersangka hanya pemilik rumahlah yang

¹²⁰ IPTU Juarsyah, Babinkamtibmas Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 26 Maret 2019

¹²¹ IPTU Juarsyah, Babinkamtibmas Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 26 Maret 2019

merupakan warga asli desa Natar selebihnya adalah warga luar desa yang diundang datang untuk bermain judi dirumah tersebut.¹²²

Perkara tindak perjudian yang marak ditemui berdasarkan data yang ada di kepolisian sektor Natar dapat dilihat dalam beberapa tahun kebelakang pada tahun 2016 sampai 2018, sebagai berikut:

No.	Jenis Perjudian	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1.	Kartu Domino	0	1	1	1	1	1
2.	Kartu Joker	1	1	1	2	0	0
3.	Sabung Ayam	1	1	1	2	1	1
4.	Kupon Putih/Togel	0	1	1	1	0	0
Total		2	4	4	6	2	2

(Sumber : Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Natar)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) jenis perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Natar, yaitu kartu domino, kartu joker, sabung ayam, dan kupon putih atau togel. Dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, kepolisian sektor Natar tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan merupakan inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat.¹²³

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara dengan Briпка Febriansyah selaku Reskrim Polsek

¹²² IPTU Juarsyah, Babinkamtibmas Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Wawancara*, 26 Maret 2019

¹²³ Briпка R. Febriansyah, Reserse Kriminal Polsek Natar, *Wawancara*, 12 April 2019

Natar menengrangkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi yaitu:

1. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)

a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.

b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat

Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

c. Hobi/ Iseng-iseng

Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang

2. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)

a. Faktor ekonomi

Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.

b. Faktor pergaulan

Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.

c. Faktor keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.¹²⁴



¹²⁴ Bripka R. Febriansyah Ahmad Fauzi, Reserse Kriminal Polsek Natar, *Wawancara*, 12 April 2019

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai bab selanjutnya akan menganalisa data yang telah di kumpulkan, sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan peraturan yang mengatur tentang larangan perbuatan perjudian dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban serta kemaslahatan masyarakat diwilayah Kabupaten lampung Selatan. yang bertujuan mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Pihak Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan perjudian, yakni melalui tim gabungan yang dibentuk oleh Bupati Lampung Selatan yang terdiri dari Polisi Pamong Praja, Polisi Resort Lampung Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan terjun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut dan melakukan operasi cipta kamtibmas. Operasi khusus untuk menanggulangi perjudian, prostitusi, dan premanisme. Operasi ini dilakukan sesuai jadwal yang telah di buat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghadapi masa rawan yang diprediksi pada setiap kalender baru dengan menerjunkan langsung tim gabungan ke daerah yang berpotensi terjadi pelanggaran.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan penanggulangan perjudian yang terjadi Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan. Pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perjudian ini adalah warga masyarakat bekerja sama dengan pihak kepolisian Sektor Natar, secara kooperatif melakukan penggerebekan dan penangkapan kepada pelaku perjudian yang sudah meresahkan warga masyarakat sekitar lokasi kejadian.

Dari data lapangan secara keseluruhan ada 2 (dua) bagian pokok dalam penanggulangan perjudian oleh pemerintah dan pihak terkait yaitu upaya Preventif dan upaya Represif, upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dari penyakit masyarakat berupa perjudian.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan (preventif).

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat. Perjudian merupakan salah satu dari beberapa penyakit masyarakat yang menyebabkan kejahatan, dan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur di tengah masyarakat kita.

Pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian, walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan. Kegiatan atau upaya pencegahan yang dilakukan yakni dengan mensosialisasikan kepada masyarakat. sosialisasi ini berupa memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian dan penyuluhan mengenai ancaman pidana akibat perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

2. Upaya Penindakan (represif)

Upaya penindakan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana dalam hal ini perjudian, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif.

Upaya penindakan (represif) yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi perjudian, antara lain:

a. Melakukan razia

Razia diawali dengan mengidentifikasikan lokasi yang ditengarai terdapat bentuk penyakit masyarakat yakni perjudian, wada waktu identifikasi ini kalau dipandang perlu petugas kadang melakukan penyamaran dengan mendatangi lokasi-lokasi tersebut untuk mengetahui secara jelas. Dan dalam melakukan razia, kerja sama bersama masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi dari masyarakat tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya sebuah tindak pidana perjudian yang terjadi disuatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

- b. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum itu sendiri

Apabila terjadinya suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat maka dapat dipastikan akan terjadinya ketidak seimbangan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidak seimbangan tersebut, yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil uraian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan. Pemerintah Daerah telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya, Dalam melaksanakan tugasnya melalui upaya preventif dan represif. Namun dalam pengawasan masih belum maksimal sehingga di harapkan lebih bekerja keras demi penghapusan perjudian yang lebih menyeluruh supaya tidak ada lagi perjudian di kalangan masyarakat.

B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan

Didalam Islam perjudian dilarang secara tegas, dan dasar larangan atau keharamannya dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 90-91 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المائدة ٩٠-٩١)

Artinya: 90. "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." 91. "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S al-Maidaah 90-91).¹²⁵

Hal ini dikaitkan, bahwa Allah Swt melarang orang-orang yang beriman mengkonsumsi *khamar*. Karena kebiasaan mengkonsumsi *khamar* dan berjudi bisa mendorong seseorang melakukan zina bahkan tindak kriminal (kejahatan), hal ini tentu merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek dalam pelaksanaan perundang-undangan masuk kedalam *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007), h. 97.

suatu negara dalam aspek pengaturan yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

Kepala Daerah atau Bupati harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang benar-benar menjalankan Syari'at, di antaranya adalah Mencegah terjadinya kriminalitas, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Allah swt, berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (الإمران : ١٠٤)

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali-Imraan : 104)¹²⁶

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ (العمران : ١١٠)

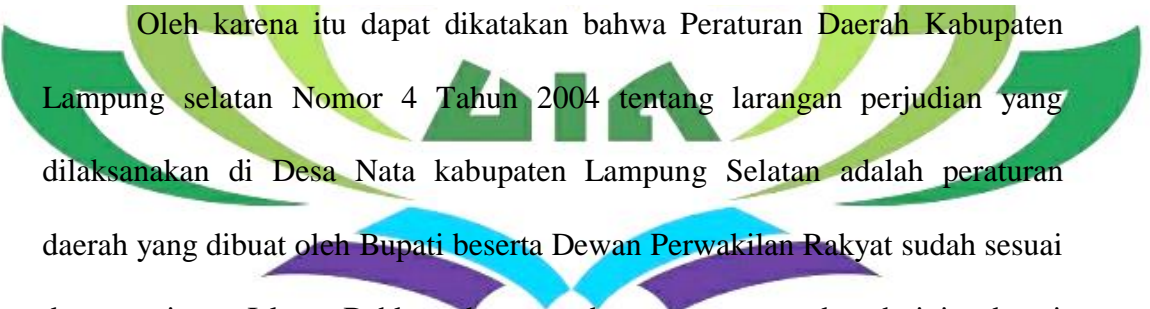
Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S Ali-Imraan : 110)¹²⁷

Dalam ayat 104 di atas, Allah swt menganjurkan kepada orang-orang Islam, hendaklah diantara mereka adalah orang-orang yang aktif menyue

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* (Solo: Qomari Prima Publister, 2007), h. 93.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 94

kepada kebaikan di jalan Allah, yaitu memberikan penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran agama yang harus di laksanakan dan di berikan penerangan tentang larangan-larangan Allah bagi orang-orang Islam. Tumbuhnya *amar ma'ruf nahi munkar* di kalangan umat Islam yang akan menjamin kebahagiaan hidup mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan ayat 110, Allah swt. menegaskan bahwa umat Islam memang diciptakan untuk menjadi umat teladan bagi umat-umat yang lain karena mereka membawa misi dakwah, yaitu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, serta mencegah segala perbuatan yang keji dan munkar.



Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian yang dilaksanakan di Desa Nata kabupaten Lampung Selatan adalah peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati beserta Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan dengan adanya peraturan daerah ini sebagai upaya untuk menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis, serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktik-praktik perjudian, karena perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesopanan yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan Perjudian di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah terwujud dan berjalan dengan baik. Dapat dilihat dengan adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya preventif pihak pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait baik Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kepolisian melalui Babinkabtibmas melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya represif pihak pemerintah daerah melakukan pengawasan dan patroli dan penangkapan dengan tegas oleh petugas sebagai penanggulangan dari perbuatan perjudian.
2. Dalam Fikih Siyasah berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek dalam pelaksanaan perundang-undangan masuk kedalam *Al-Siyyasah Tanfidziyah* melihat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten lampung selatan telah

berjalan baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Apalagi kebijakan itu bermanfaat untuk kemashalatan masyarakat dan pelaksanaan yang dilakukan dengan maksud untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan keji atau mungkar dan salah satunya adalah kegiatan perjudian dilingkup wilayah kabupaten Lampung Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis tulis tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Begitu besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian baik itu terhadap moral individu maupun masyarakat, maka hendaknya Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar lebih mengagendakan operasi-operasi cipta kamtibmas ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung guna penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang larangan perjudian agar terciptanya situasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Pemerintah dan pihak Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada aparat terkait tentang tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Qadir Al-Audah, 1998, *Al-tasyri Al-Jiniy Al- Islami*, Bairut, Dar-Alkitab
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2006, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan M. Abdul Ghofar, jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdurrahman Taj, 1993, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.
- Ahmad Saebani, 2008, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemah 30 Juz* Solo: Qomari Prima Publister.
- Fawaizul Umam, 2005, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Nusa Tenggara Barat: IAIN Mataram
- H.E. Hassan Saleh Ed.1, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: RajawaliPers.
- Hasan Muarif Ambary, 2000, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Grafika Mandala.
- Ibn Taimiyah, 1966, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat*, Dar al-Kutub al-Arabiyah, Bairut.
- Ibnu Syarif Mular, 2008, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga.
- Ibnu Syarif, Mular dan Zada, Khamami, 2008, *Fiqh siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmiah Institusi Ilmu Al-Qur'an.

Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.

Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo

J.Suyuthi Pulungan, 1997, *Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta:PT Raia Geafinda Persada

Juliyansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Press.

Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, 2009, Jakarta: Erlangga.

Lampung Tribun News, <http://lampung.tribunnews.com/>, diakses pada Kamis 12 Juni 2018 pukul 21.00 WIB

M. Ali Ash Shabuni, 1970, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an* Bandung: PT. Alma'arif.

Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbitan FH UII.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, 1994, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.

Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.

Rahman A I'Doi. 1996, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono, 2009, *Metodelogi Penelitian*, Bandung : Alfabeta.

Surmisi Ari Kunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Tim penyusun Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam, 1982, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Tsalisah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Karisma Ilmu.

Undang-Undang, Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, PT Renika Cipta.

Wahbah al-Zuhaylî, 2004, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1* Damaskus: Dâr al-Fikr.

Yusuf Qardhawi, Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam, Terj. Wahid Ahmadi, 2011, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.



